



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah

Capaian dan Tantangan Pembangunan



LPEFD
Edisi XXX
Agustus 2022

www.djpk.kemenkeu.go.id

Executive Summary

- **Indikator pembangunan nasional** berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 ditargetkan mengalami perbaikan dibanding tahun 2021 dan 2020. Salah satu capaiannya adalah pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2022 sebesar 5,44 persen yang masih dalam *range* target RKP yang diperkirakan sebesar 5.2 persen – 5.5 persen, sehingga diharapkan dapat mengungkit indikator sosial dan perekonomian lainnya.
- **Kebijakan TKD** yang berdampak pada indikator pembangunan sosial dan perekonomian di daerah khususnya beberapa indikator sasaran pembangunan dalam RKP antara lain berupa dukungan TKD untuk belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (termasuk masyarakat pedesaan), ketahanan pangan, dan pariwisata.
- **Kinerja Fiskal Daerah** triwulan II 2022 baik sisi pendapatan maupun belanja masih mengalami kontraksi dibandingkan triwulan II 2021. Kinerja belanja daerah tersebut turut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh pada semua komponen pengeluaran kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah (minus 5,24 persen Y-on-Y). Kontraksi terjadi karena menurunnya belanja penanganan pandemi dibandingkan *high base* pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan pada beberapa sektor basis pungutan daerah mendorong peningkatan penerimaan jenis Pajak Daerah yang berbasis properti dan konsumsi, sehingga membantu menahan kontraksi pendapatan daerah.
- **Kab. Teluk Bintuni** merupakan salah satu daerah yang dapat menghadirkan inovasi di bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang dapat mendukung tercapainya target indikator IPM dalam RKP. Di bidang pendidikan, Kab. Teluk Bintuni menciptakan program Rumah Pintar Masyarakat Bintuni (Rumpi Masbin).
- **Kabar Daerah** menyajikan berbagai informasi perkembangan dan upaya pemerintah daerah dalam mencapai sasaran kinerja dalam RKP masing-masing daerah diantaranya Kab. Bolaang Mongondow dan Kab. Mojokerto.
- **Editorial** membahas mengenai indikasi terjadinya transformasi struktural pada perekonomian daerah yang ditunjukkan dengan pergeseran sektor basis pasca pandemi.
- **Pada tajuk Kajian Pilihan**, berdasarkan hasil *study visit* terkait *Collaborative Governance* di Kabupaten Banyuwangi, didapat kesimpulan salah satunya bahwa kolaborasi internal menghasilkan inovasi layanan publik yang memicu proses kolaborasi eksternal karena timbulnya *public trust*.



DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	02
DAFTAR ISI	03
PEREKONOMIAN DAERAH & TRANSFER KE DAERAH	04
KINERJA FISKAL DAERAH	13
INOVASI DAERAH & KABAR DAERAH	16
EDITORIAL	21
KAJIAN PILIHAN	26

Kinerja Perekonomian Daerah Terhadap Sasaran RKP



Sejalan dengan tema besar dalam edisi kali ini, LPEFD menyajikan potret kinerja perekonomian nasional dan daerah dikaitkan dengan beberapa sasaran Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Beberapa indikator sasaran pembangunan yang akan coba diulas meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan.

Indikator pembangunan nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 ditargetkan mengalami perbaikan di banding tahun 2021 dan 2020. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami tren peningkatan sebesar 5.2 persen – 5.5 persen sehingga mengungkit indikator sosial dan perekonomian yang lain seperti tingkat pengangguran terbuka (5,5 persen – 6,3 persen), tingkat kemiskinan (8,5 persen – 9,0 persen), nilai tukar petani (103 – 105), dan nilai tukar nelayan (104 – 106). Indikator pembangunan dan pemerataan ekonomi juga ditargetkan membaik pada Indeks Pembangunan Manusia (73,41 – 73,46) dan rasio gini (0,376 – 0,378).

Pada bulan Juli 2022, aktivitas produksi dan konsumsi nasional secara umum mengalami tren positif dibanding periode sebelumnya. Indikasi kinerja positif terlihat pada indeks mobilitas masyarakat, kinerja penjualan retail (4,1 persen vs 2,9 persen yoy), dan survey manufaktur *Purchasing Managers' Index* (PMI) (51,3 persen vs 50.2 persen mtm). Hanya indeks persepsi keyakinan konsumen yang mengalami sedikit penurunan (123 vs 128 mtm) di tengah kekhawatiran peningkatan infeksi COVID-19 yang disertai kebijakan pelonggaran pembatasan mobilitas di seluruh provinsi.

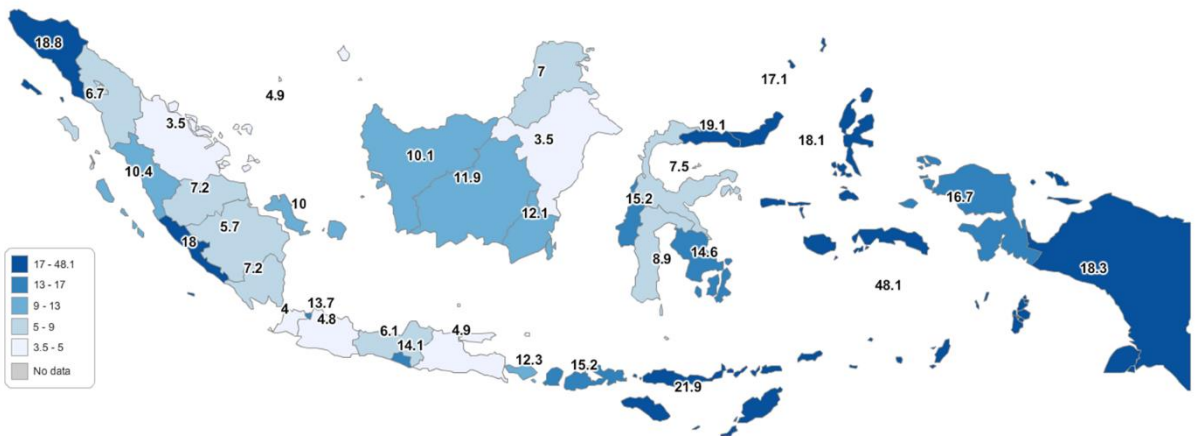
Kinerja Perekonomian Daerah Terhadap Sasaran RKP

Sejalan dengan target RKP 2022, laju pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2022 mengalami peningkatan 5,44 persen yoy, melanjutkan kinerja positif kuartal I-2022 sebesar 5,01 persen yoy. Pertumbuhan ekspansif berdasarkan pengeluaran yoy terlihat pada konsumsi rumah tangga yang naik lebih cepat (5,51 persen) dikarenakan pelonggaran pembatasan COVID-19 disertai peningkatan permintaan global atas komoditas ekspor (19,74 persen) dan impor (12,34 persen). Sedangkan pengeluaran pemerintah sedikit mengalami perlambatan (5,24 persen) yang antara lain disebabkan oleh sedikit melambatnya respon belanja pemerintah daerah atas penyaluran TKD. Sedangkan di sisi produksi yoy, laju pertumbuhan yang pesat ada pada lapangan usaha transportasi & pergudangan (21,27 persen), akomodasi & minuman (9,76 persen), dan utilitas (9,33 persen). Menurut proyeksi Bank Indonesia tren ini akan diteruskan di kuartal III-2022 dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen yoy.

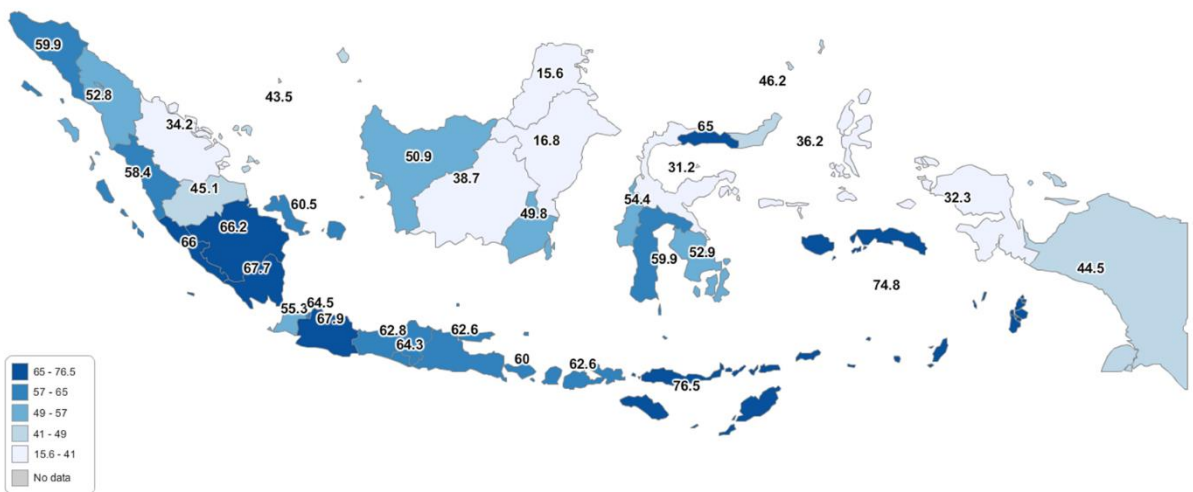
Struktur perekonomian nasional di kuartal II-2022 masih didominasi wilayah Jawa (56,55 persen) dan Sumatera (22,03 persen) dengan indikator pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di wilayah Maluku dan Papua yang berasal dari sektor pertambangan dan penggalian (7,38 persen yoy). Sedangkan, distribusi PDB menurut sisi pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah (51,47 persen), diikuti dengan PMTB (27,31 persen), ekspor (24,68 persen), dan belanja pemerintah (6,94 persen).

Secara spasial, belanja pemerintah berkontribusi tinggi terhadap aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada Provinsi Maluku (48,08 persen), NTT (21,94 persen), Gorontalo (19,13 persen), Aceh (18,76 persen), dan Papua (18,3 persen). Sedangkan provinsi lainnya, aktivitas perekonomian masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yaitu wilayah Jawa (62,75 persen s.d 67,94 persen), Sumatera bagian selatan (66,99 persen s.d. 67,75 persen), dan sebagian kawasan timur Indonesia (65,04 persen s.d. 76,51 persen).

Kinerja Perekonomian Daerah Terhadap Sasaran RKP



Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDB Triwulan II 2022 (persen). Sumber : BPS



Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDB Triwulan II 2022 (persen).
Sumber BPS

Kinerja Perekonomian Daerah Terhadap Sasaran RKP

Tekanan inflasi dan perlambatan perekonomian global menurut proyeksi IMF dapat mendorong inflasi dan mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Ekspor pada bulan Juli 2022 terindikasi menurun 2,20 persen mtm disebabkan oleh kembalinya harga komoditas utama (bahan bakar mineral; besi dan baja; dan lemak & minyak hewan/nabati) pada kondisi normal. Berdasarkan perkembangan harga komoditas global, sebagian komoditas utama ekspor-impor Indonesia mengalami penurunan yang menandai berakhirnya *windfall* komoditas. Pada bulan Juli 2022 tercatat harga minyak kelapa sawit mengalami tren penurunan (29,51 persen mtm dan 0,60 persen yoy). Demikian juga, harga nikel mengalami penurunan 16,28 persen secara mtm, meskipun secara yoy masih naik sebesar 14,20 persen.

Pada sisi impor dan konsumsi, inflasi pada bulan Juli 2022 yoy sebesar 4,94 persen seiring dengan peningkatan harga komoditas pangan dan energi, antara lain: gandum (60,95 persen), gula (9,43 persen), dan kedelai (19,91 persen), minyak mentah (43,4 persen), gas alam (90,80 persen), dan batubara (150,53 persen). Inflasi domestik Juli 2022 sebesar 0,64 persen mtm menurut pengeluaran terjadi pada beberapa kelompok.



Inflasi terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (0,31 persen), Transportasi (0,14 persen), dan Perumahan serta Utilitas Rumah Tangga (0,09 persen). Indeks harga perdagangan besar pada kelompok bangunan/konstruksi juga mengalami peningkatan (5,88 persen yoy) yang didominasi pada bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan (0,39 persen). Komoditas yang mengalami kenaikan pada sektor konstruksi tersebut terdiri dari solar, aspal, semen, dan pasir.

Inflasi pada energi diperkirakan akan persisten sepanjang tahun 2022 berdasarkan indikasi-indikasi peningkatan harga LPG non subsidi (14 persen), BBM non subsidi (12 persen s.d. 20 persen), dan tarif listrik bagi rumah tangga >3.500 VA (17,64 persen). Sedangkan inflasi pada pangan bulan Juli 2022 disebabkan oleh gangguan rantai distribusi pasokan pangan akibat curah hujan yang tinggi pada sentra produksi cabai dan bawang merah seperti di wilayah Jabar dan Jateng.

Kinerja Perekonomian Daerah Terhadap Sasaran RKP

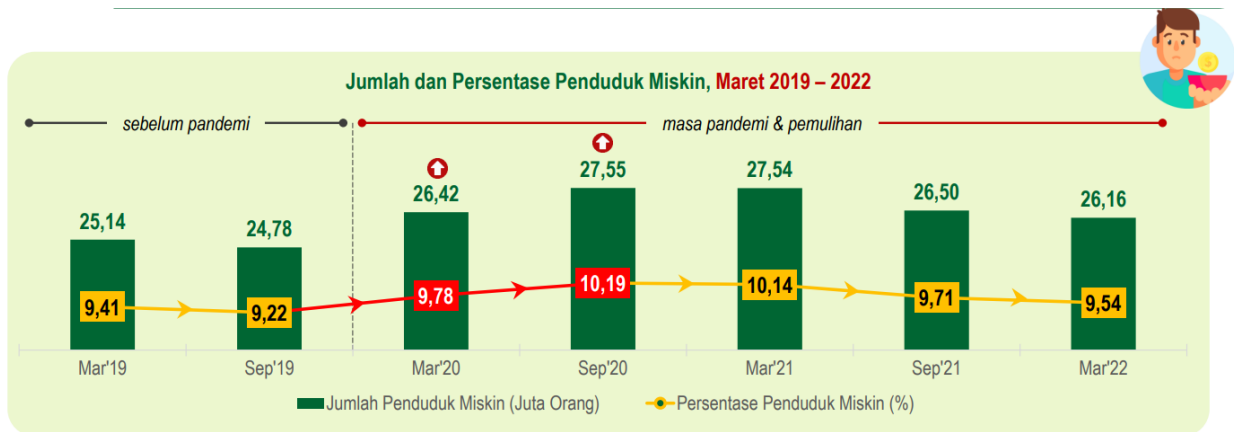


Jumlah dan Tingkat Pengangguran Februari 2020 - 2022.
Sumber: BPS

Indikator ketenagakerjaan menunjukkan kinerja relatif membaik dan berada pada rentang target indikator RKP 2022. Tingkat pengangguran terbuka bulan Februari 2022 menunjukkan persentase sebesar 5,83 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,43 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. Selama periode Februari 2021 – Februari 2022, kontribusi tertinggi tenaga kerja terdapat pada lapangan usaha pertanian sekitar 1,86 juta orang, lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan masing-masing sekitar 850 ribu dan 640 ribu tenaga kerja. Namun demikian, COVID-19 telah berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja yaitu turun menjadi 9,44 juta penduduk usia kerja dibandingkan 15,72 juta penduduk usia kerja di bulan Februari 2021.

Indikator kemiskinan bulan Maret 2022 masih menunjukkan kinerja yang belum memuaskan meskipun lebih dibanding dengan tahun 2021. Masih terdapat 26,16 juta orang penduduk miskin, namun angka ini turun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan turun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Sedangkan secara persentase, penduduk miskin menunjukkan indikator sebesar 9,54 persen, turun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan turun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Kemiskinan di wilayah perkotaan mengalami penurunan menjadi sebesar 7,50 persen. Demikian pula, indikator penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi 12,29 persen di mana sektor pertanian masih menjadi penopang perekonomian pedesaan pada sentra-sentra produksi pertanian seperti padi dan komoditas pertanian lain.

Kinerja Perekonomian Daerah Terhadap Sasaran RKP



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2019 - 2022. Sumber: BPS

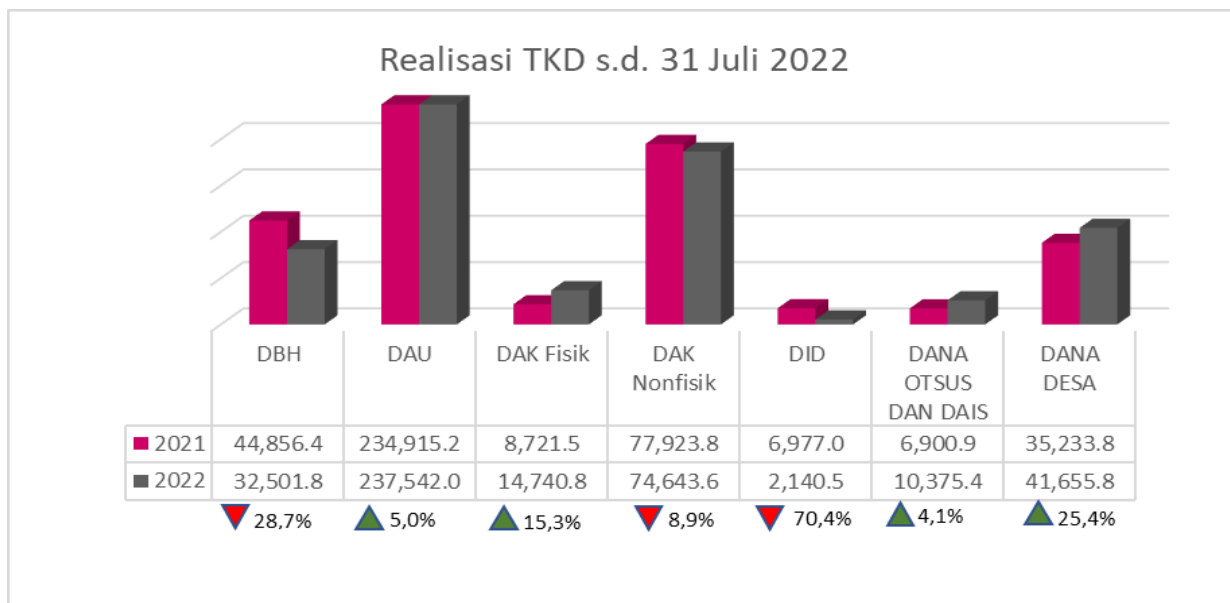
Sejalan dengan indikator kemiskinan yang membaik di perdesaan, indikator daya beli petani nasional di bulan Juli 2022 berdasarkan nilai tukar petani (NTP) sebesar 104,25 atau menunjukkan penurunan 1,61 persen mtm yang disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani turun (1,04 persen mtm) pada komoditas kelapa sawit, jagung, karet, dan kelapa. Sedangkan harga yang dibayar petani mengalami peningkatan (0,58 persen mtm), khususnya pada komponen upah permanen, pupuk dan bibit. Provinsi Riau mengalami penurunan NTP terbesar (11,43 persen), sedangkan Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan NTP tertinggi (1,70 persen). Hal tersebut diikuti dengan penurunan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) sebesar 105,47 atau turun 1,34 persen mtm. Namun demikian, indikator Harga Gabah Kering Panen di Tingkat Petani naik 0,68 persen mtm dan juga Harga Beras Premium di penggilingan naik 1,38 persen mtm. Indikator lain yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami kenaikan menjadi 107,10 dibanding bulan Juni 2022 sebesar dari 106,96. Penyebabnya antara lain adanya peningkatan permintaan perikanan tangkap domestik dan ekspor yang disertai dengan penguatan harga beberapa komoditas perikanan.

Pada sektor pariwisata, di bulan Juni 2022 terdapat 345,4 ribu kunjungan di pintu masuk utama (Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, dan Batam) atau naik sebesar 62,69 persen mtm. Hal tersebut diikuti dengan peningkatan okupansi hotel berbintang sebesar 50,28 persen atau meningkat 0,43 persen mtm. Secara spasial, urutan tertinggi tingkat hunian hotel berbintang tersebut terdiri dari DIY (66,45 persen), Kaltim (64,60 persen), dan Lampung (58,87 persen). Sejalan dengan hal tersebut, angkutan udara internasional dan kereta api mengalami peningkatan mtm, masing-masing 23,8 persen dan 0,29 persen.

Kinerja Transfer ke Daerah

Respon kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) s.d. bulan Juli 2022 menunjukkan penyaluran TKD TA 2022 lebih rendah dibandingkan TA 2021 dikarenakan kinerja beberapa jenis TKD masih belum optimal pelaksanaannya di pemerintah daerah. Namun demikian penyaluran pada beberapa jenis TKD yang memiliki pagu besar seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa memiliki kinerja lebih baik dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Secara nominal penyaluran TKD TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dengan nilai penyaluran TKD sebesar Rp425,20 T atau 52,8 persen terhadap total Alokasi TKD 2022, di mana capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp427,80 T atau 53,8 persen dari total alokasi TKD 2021.

dalam miliar Rupiah



Realisasi TKD s.d. 31 Juli 2022. Sumber: DJPK

Kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami pertumbuhan nominal paling positif (53,1 persen yoy), karena proses lelang dan syarat salur DAK Fisik disampaikan lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan positif berikutnya terdapat pada nominal penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan (50,3 persen yoy) disebabkan telah disalurkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap II terhadap daerah penerima dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Peningkatan kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan syarat salur Dana Desa berdampak positif pada kinerja nominal penyaluran Dana Desa lebih tinggi dari sebelumnya (13,6 persen yoy). Demikian pula nominal penyaluran DAU mengalami kenaikan (1,7 persen yoy) disebabkan oleh kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Kinerja Transfer ke Daerah

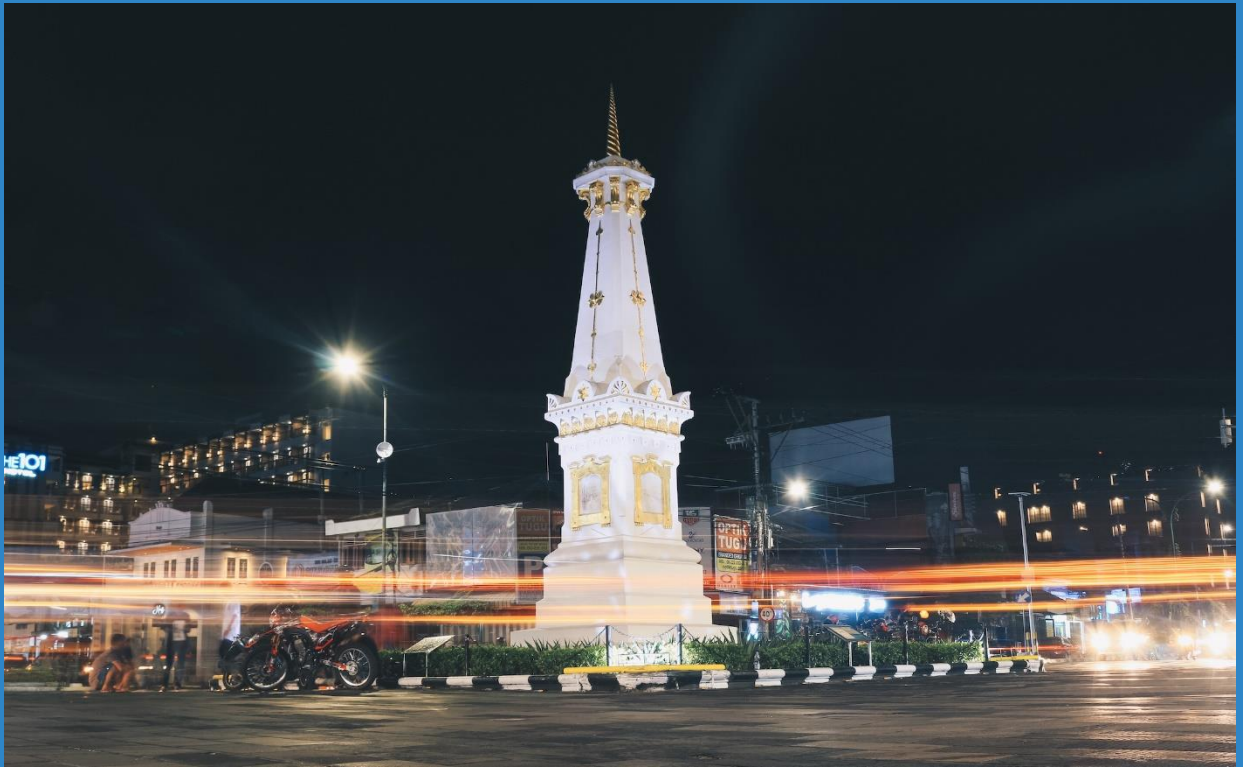
Kinerja penyaluran TKD yang mengalami kontraksi atau penurunan nominal penyaluran dibanding TA 2021 terlihat pada Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil (DBH), dan DAK Nonfisik. Penyaluran DID tahap I telah disalurkan seluruhnya bahkan terdapat 31 daerah yang telah disalurkan DID 100 persen, namun persentase lebih rendah (69,4 persen yoy) disebabkan pagu alokasi DID turun sebesar 48 persen dibandingkan TA 2021. Sedangkan Penyaluran DBH lebih rendah (27,8 persen yoy) karena pada tahun 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp19,5 T. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 Rp32,50T lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp25,52 T. Selanjutnya, penyaluran DAK Nonfisik mengalami perlambatan (4,7 persen yoy) disebabkan penurunan kinerja daerah dalam memenuhi syarat salur, terutama daerah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang memiliki pagu alokasi besar.

Kebijakan TKD yang berdampak pada indikator pembangunan sosial dan perekonomian di daerah khususnya beberapa indikator sasaran pembangunan dalam RKP antara lain berupa dukungan TKD untuk belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (termasuk masyarakat pedesaan), ketahanan pangan, dan pariwisata.

Dukungan TKD pada aspek layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk membangun dan mempertahankan SDM daerah yang berkualitas di daerah agar lebih berdaya saing, terampil, inovatif, produktif, dan berkelanjutan dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonominya. Estimasi alokasi dukungan TKD bidang pendidikan dan kesehatan s.d. bulan Juli 2022 masing-masing sebesar Rp290,9 T dan Rp35,07 T dengan realisasi masing-masing sebesar Rp175,1 T (59,87 persen) dan Rp13,26 T (39,06 persen).



Kinerja Transfer ke Daerah



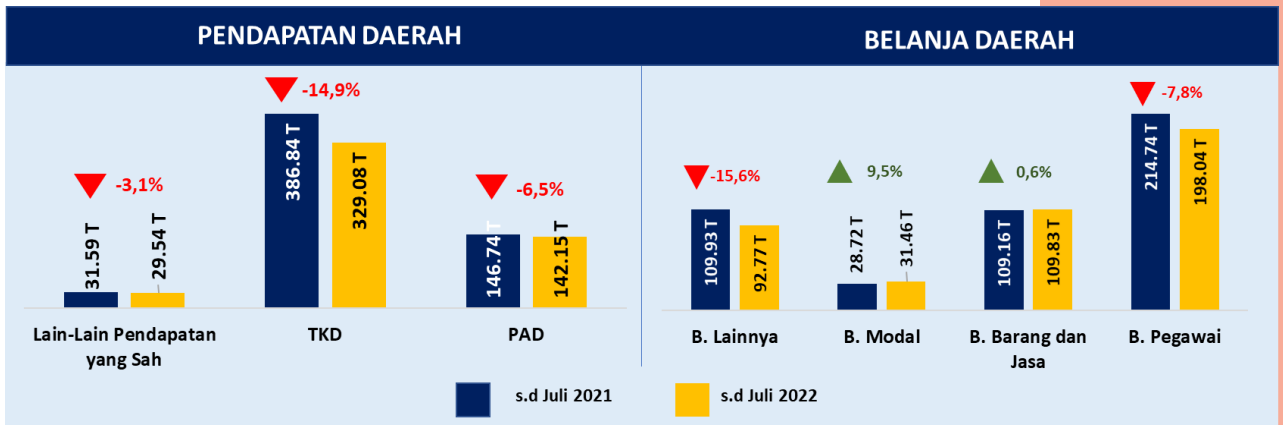
Pada aspek penguatan daya beli, dukungan TKD perlindungan sosial dan ketahanan pangan ditujukan sebagai bantalan sosial masyarakat termasuk masyarakat petani, nelayan, rumah tangga di pedesaan di saat menghadapi tekanan inflasi dari harga komoditas energi dan pangan. Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa diberikan dengan besaran Rp300.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan yang penyalurannya dilaksanakan tiap triwulan. Sebesar Rp16,69 T (61,26 persen) BLT desa telah tersalurkan kepada masyarakat pedesaan dari alokasi BLT desa Rp27,2 T. Selanjutnya, estimasi realisasi TKD untuk bidang ketahanan pangan adalah sebesar Rp2,41 Triliun (29,23 persen) dari alokasi Rp8,26 T yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pada aspek infrastruktur, dukungan TKD belanja investasi infrastruktur dimaksudkan untuk menunjang dan memfasilitasi aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat daerah berupa penyediaan jalan, irigasi, perumahan/permukiman, sanitasi, dan air minum termasuk untuk kemudahan distribusi dan rantai pasok komoditas ekonomi. Alokasi TKD bidang infrastruktur adalah sebesar Rp91,96 persen dengan realisasi sebesar Rp42 T (45,67 persen) yang berasal dari Dana Transfer Umum (DTU), DTI, dan DAK Fisik.

Di sektor pariwisata, dukungan TKD bidang pariwisata bertujuan untuk mengembangkan kawasan destinasi pariwisata sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Alokasi TKD bidang pariwisata sebesar Rp2,86 T telah terealisasi sebesar Rp 704,1 milyar (24,61 persen) yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Kinerja APBD

Kinerja APBD secara YoY sampai dengan bulan Juli 2022 masih perlu terus dioptimalkan. Hal ini dikarenakan sampai dengan akhir bulan Juli 2022, capaian APBD secara tahunan baik dari sisi pendapatan maupun belanja masih mengalami kontraksi.

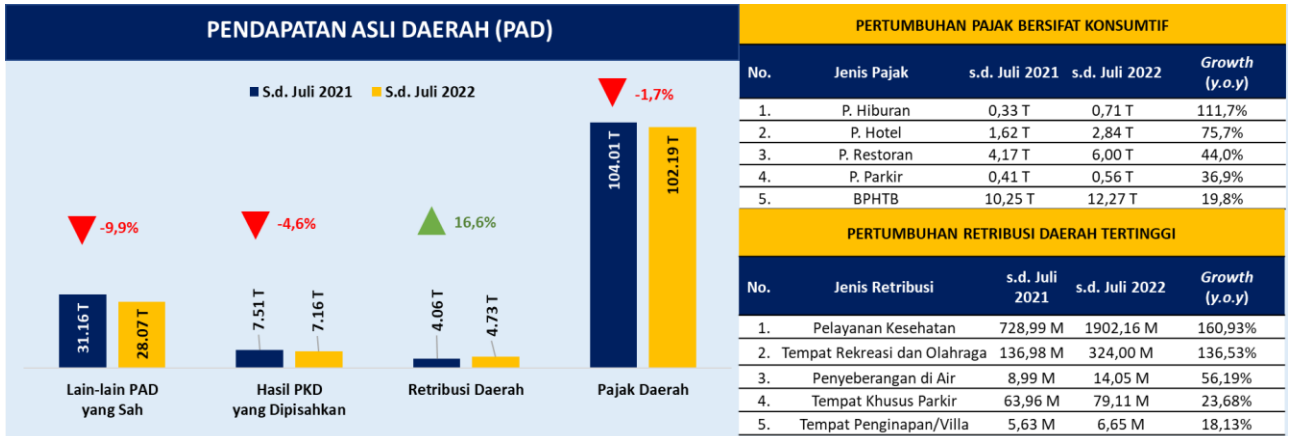


Dari sisi realisasi Pendapatan Daerah, APBD terkontraksi sebesar 11,4 persen dari Rp 565,18 T (49,4 persen terhadap total APBD) pada Juli 2021 menjadi Rp 500,77 T (44,5 persen terhadap total APBD) pada Juli 2022. Penurunan ini terjadi di seluruh kelompok besar pendapatan yakni PAD (-3,1 persen), TKD (-14,9 persen), dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (-6,5 persen).

Penurunan realisasi Pendapatan TKD disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana telah dijelaskan pada seksi bahasan sebelumnya. Sedangkan perbedaan angka realisasi TKD antara APBN dan APBD disebabkan karena adanya keterlambatan pencatatan dan pelaporan realisasi pendapatan TKD oleh pemerintah daerah.

Meskipun terdapat penurunan PAD, namun secara komponen, retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 16,6 persen serta jenis pajak yang berbasis konsumsi (pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/BPHTB) tumbuh cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di daerah semakin membaik, bahkan penerimaan dari Pajak Hiburan naik cukup signifikan pada angka 111,7 persen. Komponen retribusi yang menyumbang kenaikan tertinggi diantaranya ada retribusi pelayanan kesehatan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi tempat penginapan/villa.

Kinerja APBD



Pada periode yang sama, sisi belanja daerah secara total juga mengalami penurunan yakni sebesar 6,6 persen dari Rp462,54 triliun (38,0 persen terhadap total APBD) pada Juli 2021 menjadi Rp432,11 triliun (36,4 persen terhadap total APBD) pada Juli 2022. Secara komponen YoY, terjadinya penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pada realisasi belanja pegawai sebesar minus 7,8 persen dan belanja lainnya minus 15,6 persen.

Komponen belanja pegawai yang mengalami persentase penurunan paling tinggi adalah komponen honorarium pengelolaan dana BOS yakni sebesar Rp354,8 miliar atau minus 48,24 persen (YoY). Namun demikian, secara nominal penurunan terbesar terjadi pada komponen gaji dan tunjangan yakni sebesar Rp14,3 triliun atau minus 8,6 persen (YoY).

Komponen belanja lainnya yang mengalami penurunan adalah belanja tak terduga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang relatif lebih terkendali sehingga belanja kembali diarahkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh data belanja berfungsi. Belanja fungsi ekonomi meningkat sebesar 1,8 persen sedangkan, belanja fungsi kesehatan dan belanja fungsi perlindungan sosial (perlinsos) mengalami penurunan masing-masing sebesar minus 5,3 persen dan minus 30,0 persen.

Adapun terjadinya kenaikan belanja modal sebesar 9,5 persen disebabkan oleh pertumbuhan belanja modal angkutan darat bermotor dan angkutan udara, alat ukur, laboratorium dan alat kedokteran, komputer, konstruksi jalan dan bangunan, serta pengadaan tanah. Sedangkan peningkatan belanja barang dan jasa sebesar 0,6 persen didorong oleh pertumbuhan belanja perjalanan dinas, belanja habis pakai, beasiswa pendidikan PNS, dan belanja jasa konsultasi.

Kinerja APBD

Selanjutnya, sebagaimana telah diulas pada tajuk sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2022 masih berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun untuk tahun 2022, indikator pertumbuhan ekonomi oleh Pemerintah dipatok pada kisaran angka 5,2 persen sampai dengan 5,5 persen. Atas sasaran tersebut, kondisi ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 dibanding dengan triwulan II-2021 masih *on-track* dengan mengalami pertumbuhan sebesar 5,44 persen (YoY).

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2022 disokong oleh semua komponen pengeluaran kecuali pengeluaran konsumsi Pemerintah yang tumbuh negatif pada angka minus 5,24 persen (YoY). Kontraksi tersebut terjadi karena menurunnya belanja penanganan pandemi jika dibandingkan *high base* pada tahun sebelumnya. Pada level sub-nasional, fenomena tersebut masih berlanjut hingga Bulan Juli 2022, di mana belanja APBD masih terkontraksi khususnya belanja lainnya yang mengalami penurunan sebesar minus 15,6 persen dan belanja pegawai sebesar minus 7,8 persen.

Sedangkan dari sisi lapangan usaha, terjadi peningkatan pada hampir seluruh sektor kecuali sektor jasa pendidikan dan sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib. Peningkatan pada sektor akomodasi dan makan minum, sektor *real estate*, dan sektor transportasi dan pergudangan juga berdampak pada kenaikan penerimaan daerah khususnya yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut, seperti pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan BPHTB sebagaimana dapat terlihat pada tabel pada halaman 14.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan geliat perekonomian di daerah telah dapat dilihat dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat mendukung penerimaan daerah. Namun demikian, pemerintah daerah harus segera dapat meningkatkan kualitas belanjanya agar penerimaan yang dipungut dari perekonomian, dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mendorong dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.





INOVASI

Kab. Teluk Bintuni

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sasaran pembangunan tahun 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Adapun salah satu diantara delapan Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditargetkan mencapai nilai 73,41 – 73,46 pada Tahun 2022. IPM memiliki tiga dimensi dalam penghitungannya yakni dimensi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Dimensi kesehatan memiliki indikator AHH (Angka Harapan Hidup) sedangkan dimensi pendidikan memiliki indikator HLS (Harapan Lama Sekolah) dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah). Pencapaian sasaran pembangunan tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, namun juga dibutuhkan peran dan inovasi dari pemerintah daerah.

INOVASI

Kab. Teluk Bintuni

Kab. Teluk Bintuni merupakan salah satu daerah yang dapat menghadirkan inovasi di bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang dapat mendukung tercapainya target indikator IPM. Di bidang pendidikan, Kab. Teluk Bintuni menciptakan program Rumah Pintar Masyarakat Bintuni (Rumpi Masbin), di mana program tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan literasi dan mengurangi angka buta huruf di Distrik Babo dan Distrik Weriagar. Rumah pintar tersebut menyelenggarakan program edukasi berupa baca tulis dan juga dalam pengoprasian komputer. *Output* dari program tersebut cukup menggembirakan, dimana dari 5.216 jiwa warga kedua distrik tersebut rata-rata setengahnya mengunjungi rumah pintar tersebut dalam tiap bulannya. Selain itu, Kab. Teluk Bintuni juga mengalokasikan anggaran bidang pendidikan. Dengan meningkatnya literasi akan pendidikan, diharapkan mampu meningkatkan minat untuk bersekolah sehingga dapat mendukung HLS dan RLS dalam dimensi pendidikan dalam IPM.

Selain bidang pendidikan, Kab. Teluk Bintuni juga mempunyai program inovasi di bidang kesehatan. Program bidang kesehatan yang digagas oleh pemerintah daerah adalah ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang identifikasi, pencegahan, dan pengobatan malaria, dengan bentuk program berupa *Early Diagnosis And Treatment* (EDAT). Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi non-Pemerintah, dan sektor swasta yang fokus dalam pengurangan kasus malaria melalui pembentukan Juru Malaria Kampung (JMK) atau spesialis malaria. Selain itu, petugas juga melakukan pelatihan kepada penduduk desa sebagai petugas kesehatan, mengemas obat-obatan malaria agar lebih mudah digunakan, dan memastikan kualitas asuransi yang terintegrasi. Bentuk keberhasilan adanya program inovasi ini ditunjukkan dengan data keberhasilan mengurangi tingkat morbiditas malaria melalui nilai *Annual Parasite Incidence* (API) dari 105 penderita per 100 orang di tahun 2009 menjadi 5 penderita malaria dari 1000 penduduk (2016), dan di tahun 2021 nilai API teluk berada di angka 2.4 per 1000 penduduk. Inovasi Kab. Teluk Bintuni ini tidak hanya mendapat penghargaan dari pemerintah melalui Kementerian PAN RB, namun program EDAT ini juga berhasil menjadi pemenang dalam penghargaan secara internasional pada *United Nations Public Service Awards* (UNPSA) di tahun 2018. Dengan menurunnya morbiditas masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan AHH penduduk Teluk Bintuni sekaligus mendukung pencapaian indikator dimensi kesehatan dalam sasaran pembangunan dalam RKP.

Kabar Daerah

Pada hari Senin, 18 Juli 2022, Wakil Bupati Nunukan menyampaikan nota pengantar penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2023, di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Nunukan. Penyusunan KUA PPAS tidak terlepas dari arah kebijakan nasional, keberhasilan pembangunan nasional, dan capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pemkab Nunukan berupaya mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah sehingga akan tercapai keselarasan antara nasional dan daerah. Pada tahun 2023, Sasaran target capaian indikator makro pembangunan Nunukan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,10 persen, Angka Kemiskinan 5,72 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,79 persen, Pertumbuhan Ekonomi 5,47 persen dan Gini Rasio 0,282 persen. Selain fokus pada pencapaian target sasaran, juga masih harus menyelesaikan permasalahan dan tantangan pasca pandemi Covid-19 dengan memberikan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial. Berdasarkan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah beserta kerangka pendanaan, secara garis besar pada KUA APBD 2023 pendapatan daerah 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1,201 triliun lebih rendah dibandingkan target pendapatan 2022 sebesar Rp 1,3 triliun. Sementara untuk anggaran belanja 2023 direncanakan senilai Rp1,201 triliun dan angka ini lebih tinggi dibanding belanja 2022 senilai Rp1.118 triliun. Belanja operasi senilai Rp840,607 miliar, belanja modal 2023 senilai Rp107,272 miliar, sementara belanja tak terduga diproyeksi turun sebesar Rp14,992 dari belanja tak terduga 2022 sebesar Rp30,486 miliar dan belanja transfer sebesar Rp238,148.

<https://pusaranmedia.com> (diunduh 13 Agustus 2022)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Pemulihan ekonomi dampak Covid-19 masih menjadi fokus utama Musrenbang dan dilakukan dengan cara pemerataan dan penguatan infrastruktur dalam segala bidang. Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab Mojokerto, memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kab Mojokerto tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,21 persen setelah sebelumnya pada tahun sebesar 1,11 persen. Sementara Provinsi Jawa Timur di angka 3,57 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 3,69 persen. Struktur ekonomi tahun 2022, dari sisi produksi didominasi Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 55,77 persen. Dari sisi pengeluaran, didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 54,98 persen. Perekonomian Kab Mojokerto tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp87.261,74 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp60.198.70 milyar. Jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 mencapai 120,54 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 1,74 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2022, yaitu, sebesar 118,80 ribu jiwa. Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari 10,57 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 10,62 persen pada tahun 2021. Garis kemiskinan pada tahun 2021 sebesar Rp417.784,00 per kapita per bulan bertambah sebesar Rp11.741,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 2,89 persen bila dibanding kondisi tahun 2022 sebesar Rp406.044,00. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 623.808 orang bertambah 12.418 orang dibanding tahun 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 turun sebesar TPAK tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPU) tahun 2021 sebesar.

<https://beritajatim.com> (diunduh 13 Agustus 2022)

Kabar Daerah

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring telah memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023. Menurut Dirjen Bangda, Musrenbang memiliki arti penting untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, serta klarifikasi atas program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan untuk disepakati menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2023. Dirjen menekankan perlunya mempersiapkan dukungan dan pengondisian dalam menghadapi tahun politik. Tak hanya itu, perlu juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan pemenuhan target pembangunan di Bali. Ini mengingat, 2023 merupakan tahun terakhir periode pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Dalam penyusunan RKPD 2023, harus mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan mengembangkan inovasi dan kolaborasi dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Kemudian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu tetap memperhatikan kebijakan pengendalian, penanggulangan, serta pemulihan ekonomi menuju pandemi Covid-19. Selanjutnya, Pemrov Bali harus segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023 agar nantinya penetapan RKPD Provinsi Bali dapat tepat waktu. Di lain sisi, Dirjen juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya penurunan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Pasalnya, angka capaian tersebut menunjukkan kondisi yang relatif baik, sehingga perlu terus ditingkatkan. Apresiasi juga diberikan terhadap beberapa capaian indikator makro yang dinilai lebih baik ketimbang capaian pada 2020. Capaian itu seperti tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan lainnya. Khusus laju pertumbuhan ekonomi, Bali masih tercatat sebagai yang terendah di Indonesia dengan angka -2,47 persen. Kondisi ini akibat merebaknya pandemi Covid-19 yang memukul telak sektor pariwisata di Bali.

<https://wartaekonomi.co.id> (diunduh 13 Agustus 2022)

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulsel, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kemendagri memberikan apresiasi atas capaian pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan (Prov Sulsel). Menurut Dirjen Bangda, capaian pembangunan makro khususnya Prov Sulsel, berdasarkan data pada tahun 2021 hampir semua menunjukkan capaian yang baik. Kemiskinan Prov Sulsel menunjukkan tren penurunan, yaitu pada September 2021 sebesar 8,53 persen, menurun 0,25 persen dibandingkan Maret 2021 sebesar 8,78 persen. Sementara, persentase penduduk miskin di Indonesia 9,71 persen. Capaian makro lainnya juga menunjukkan tren yang baik, yaitu laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan 4,65 persen yang sebelumnya berkontraksi -0,71 persen. Pengangguran, gini rasio, dan IPM menunjukkan tren yang naik.

<https://makassarmetro.com> (diunduh 13 Agustus 2022)

Kabar Daerah

Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, tingkat kecamatan di Dumoga Barat, Dumoga Utara dan Dumoga Tenggara. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bolmong memaparkan target dan capaian Indikator RPJMD Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmong mulai sejak tahun 2017 hingga capaian 2022. Pada misi yang pertama Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan tertatalaksana, menampakan adanya peningkatan capaian indikator dari tahun 2018 hingga 2022, mengalami peningkatan, mulai dari awal berada pada 60 persen terus mengalami peningkatan di setiap tahun, dengan meningkatnya kualitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, juga meningkatnya kualitas pelayanan publik, sesuai dengan sasaran. Pada misi yang kedua, Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal, memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif. Dengan sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Kemudian pada Misi yang ketiga, Mewujudkan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat, indikatornya juga terus mengalami adanya peningkatan, mulai dari awal hanya berada pada 9,11, terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga target tahun 2022 berada pada angka 11,5. Dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan. Baik itu indikator sasaran, angka harapan lama sekolah, serta angka rata-rata lama sekolah terus meningkat, mengalami kemajuan. Pada misi yang keempat, Mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, terjangkau dan berkualitas. Dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta sasarannya adalah meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat Bolaang Mongondow.

<https://detotabuan.com> (diunduh 13 Agustus 2022)





Gambar : schoolmedia.id

EDITORIAL

Capaian RKP dan Transformasi Struktural Perekonomian Daerah dalam Mengatasi Pandemi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan. Sebagaimana dijelaskan pada tajuk-tajuk sebelumnya, kinerja perekonomian Indonesia hingga triwulan II-2022 masih menunjukkan tren positif. Jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), indikator kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan capaian masih dalam koridor target yang ditetapkan. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 menurut BPS mencapai Rp4.919,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.923,7 triliun, atau capaian ini menunjukkan pertumbuhan PDB triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 tumbuh sebesar 5,44 persen year-on-year (y-on-y). Secara komparasi capaian pertumbuhan PDB pada triwulan II-2021 tercatat sebesar 7,07 persen (y-on-y), sementara PDB triwulan II-2019 tumbuh 5,05 persen (y-on-y). Capaian pertumbuhan PDB triwulan II-2022 yang turun adalah sesuai dengan ekspektasi pasar terkait perubahan baseline PDB atau efek kurva-J berkat pelonggaran defisit APBN di atas 3 persen PDB dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sektor Keuangan.

Kiranya ekspansi fiskal dari UU Nomor 2 Tahun 2020 cukup membawa dampak nyata dengan pertumbuhan PDB triwulan II-2021 besaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07 persen dari sisi PDB pengeluaran. Berbagai kebijakan ekonomi telah dilaksanakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah telah merestrukturisasi anggaran belanja APBN dengan mengalihkan anggaran belanja dari kegiatan yang tidak mendesak ke belanja penanganan Covid-19. Dana tersebut digunakan sebagai tambahan jaminan sosial dan stimulus ekonomi. Disamping itu, restrukturisasi kredit korporasi juga dilakukan melalui perbankan. Warga miskin diberikan bantuan sosial berupa paket sembako, PKH, BLT, dan sebagainya. Sedangkan karyawan yang putus kerja disediakan tambahan dana KUR, bantuan Pra-Kerja, dan lainnya. Di sisi anggaran pendapatan dalam APBN, penurunan juga terjadi terutama di sektor perpajakan akibat penurunan kinerja ekonomi.

Dengan kebijakan PSBB yang berlaku sejak Maret 2020, ekonomi Indonesia mengalami resesi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi berturut-turut pada kuartal I dan kuartal II.

EDITORIAL

Pada kuartal I 2020 ekonomi tumbuh hanya 2,97 persen, menurun dari sekitar 2 persen pada kuartal IV tahun 2019. Pada kuartal II tahun 2020, pertumbuhan PDB tercatat minus sekitar 5,32 persen. Memasuki tahun 2021, pelonggaran PSBB dilakukan dengan masa transisi, yaitu mengizinkan membuka secara terbatas (di bawah *full capacity*) sejumlah kegiatan ekonomi di zona tertentu. Perkantoran, pasar modern dan tradisional, restoran, pertokoan, transportasi, pabrik, pariwisata, mulai dibuka dengan mengedepankan protokol kesehatan. Rumah ibadah dan kegiatan budaya mulai dibuka secara terbatas. Salah satu capaian Pemerintah adalah berhasil menahan kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang hanya sebesar -2,07 persen year on year (yoy) dan ini menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-4 di antara negara G20. Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan kebijakan APBN, termasuk transfer ke daerah.

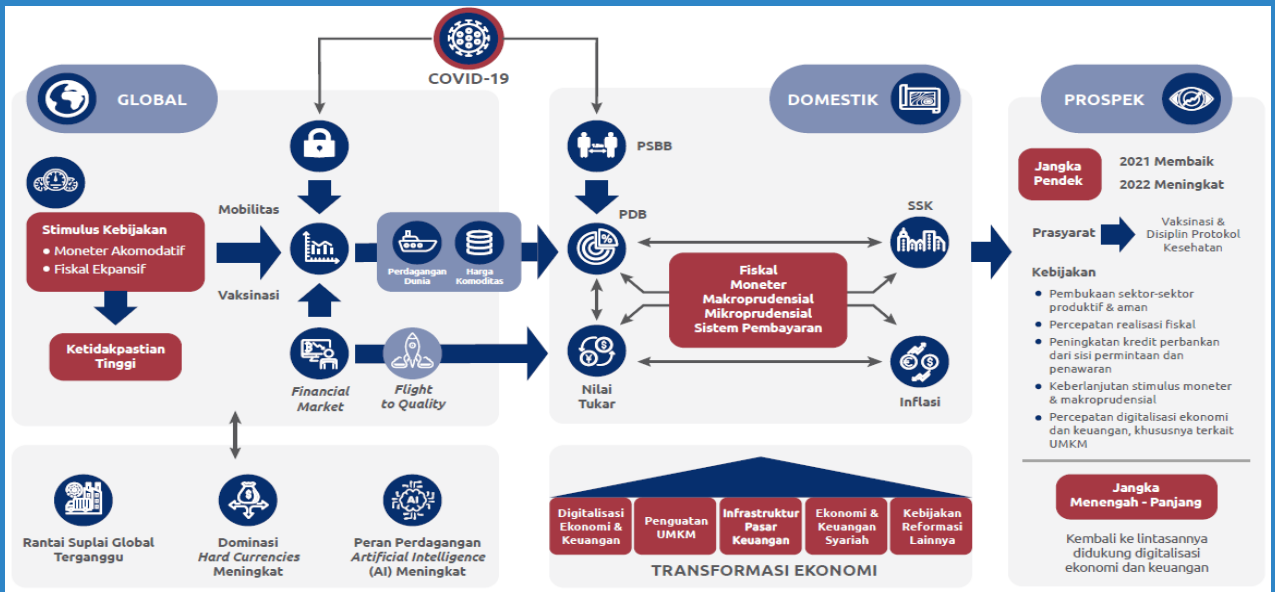
Pertumbuhan PDB Indonesia triwulan II-2022 terjadi pada hampir semua lapangan usaha dengan pencatatan tertinggi oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 21,27 persen, kemudian Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,76 persen. Kedua sector ini menandakan lonjakan mobilitas baik barang dan jasa, walau Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi dominan tumbuh sedikit sebesar 4,01 persen. Dari sisi pengeluaran di triwulan yang sama, Ekspor Barang dan Jasa tumbuh tertinggi sebesar 19,74 persen berkat *windfall* kenaikan harga komoditas energi. Dibandingkan terhadap triwulan II-2021 terjadi pertumbuhan pada semua lapangan usaha dengan dua besar pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,10 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,58 persen. Di triwulan yang sama, semua komponen sisi pengeluaran tumbuh dengan Ekspor Barang dan Jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78 persen (y-on-y). Capaian di dua tahun terakhir sangat kontras dari PDB triwulan II-2020 yang tumbuh negatif (kontraksi) pada semua komponen pengeluaran dengan tiga besar

dari komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,66 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,61 persen; dan PK-LNPRT sebesar 7,76 persen.

Secara spasial, pertumbuhan (y-on-y) triwulan II-2022 terjadi di semua kelompok pulau. Hal ini terutama terlihat pada kelompok provinsi di Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 56,55 persen, dan pertumbuhan (y-on-y) sebesar 5,66 persen. Angka tersebut sedikit bergeser dari struktur ekonomi Indonesia yang secara spasial pada triwulan II-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 6,69 persen. Sementara itu kelompok Pulau Maluku dan Papua mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 2,36 persen, walaupun kontribusinya terkecil (kurang dari tiga persen) dibanding kelompok pulau lainnya. Kinerja perkembangan PDB tersebut terlihat indikasi transformasi struktural selama periode pandemi 2020-2021 (bahkan hingga penulisan di Agustus 2022).

Mengacu kepada Perpres nomor 115/2021, 112/2020, dan 62/2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) masing-masing untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 dapat cermati bahwa (1) RKP tahun 2022 diarahkan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat mempercepat transformasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta tetap mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan peran wilayah di luar Janta-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali; (2) RKP tahun 2021 bertujuan untuk memacu menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah;

EDITORIAL



dan (3) RKP tahun 2020 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, pengembangan jaringan transportasi massal, penguatan konektivitas yang dapat menciptakan nilai tambah dan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai perdagangan wilayah dan memperkuat daya saing wilayah.

Percepatan pertumbuhan wilayah dimaksud dalam ketiga Perpres di atas dilakukan dengan mengembangkan kawasan strategis secara terpadu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan perkotaan (megapolitan dan metropolitan), serta Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Pengembangan kawasan perkotaan khususnya kawasan metropolitan dan kota-kota besar sebagai pusat pertumbuhan wilayah dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik perkotaan dan memperluas kerjasama antardaerah yang mencakup kota-kota satelit di sekitarnya dalam pengelolaan transportasi, air bersih dan sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan. Selain utamanya memobilisasi penanganan Covid-19 oleh seluruh Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang di luar ekspektasi dapat memicu transformasi sektor basis daerah sebagaimana ilustrasi diagram-1 mekanisme transmisi transformasi struktural sektor basis daerah.

Selain itu, pandemi telah memutar paradigma kausalitas yang semula perbaikan di sisi ekonomi di hulu dan terus diiringi dengan perbaikan di sisi kesehatan menjadi sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari kasus Indonesia di mana penguatan kualitas penanganan Covid-19 menjadi faktor penentu pemulihan ekonomi nasional. Keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia, terlihat dari turunnya kasus aktif di Indonesia pasca puncak pandemi menjadi sebesar 16.697 per 19 Oktober 2021 yang lebih rendah dibandingkan dengan India, AS, Brazil, Jerman, Perancis, dan Inggris. Di saat yang sama, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia telah mencapai 96,2 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat kesembuhan global yang sebesar 90,6 persen. Adapun angka positivity rate Indonesia berada di bawah 0,5 persen dengan reproduction rate di bawah 1 persen. Selain melalui strategi pembatasan mobilitas masyarakat, akselerasi vaksinasi juga menjadi kunci dalam menekan laju penyebaran virus Covid-19. Per 19 Oktober 2021, total dosis vaksinasi yang telah dilakukan di Indonesia telah mencapai 174 juta dosis sehingga menjadikan Indonesia berada di posisi ke-5 di dunia, di antaranya berkat mobilisasi DAU dengan *earmarked* 8 persen.

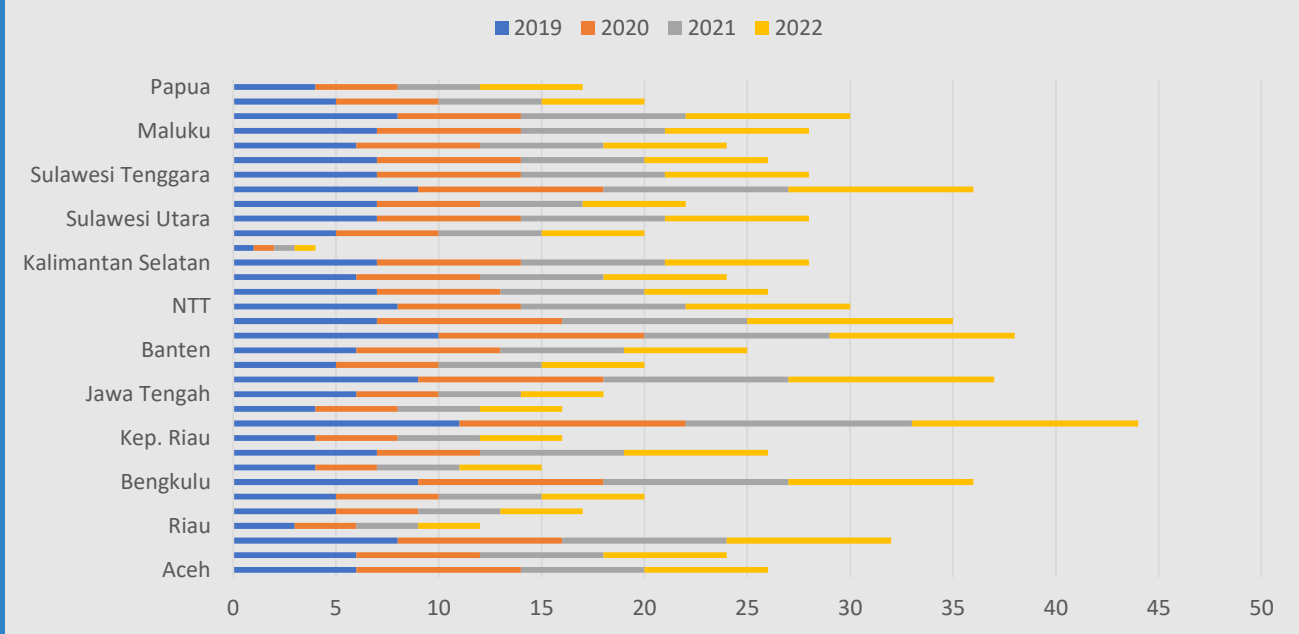
EDITORIAL

Dengan perkembangan indikasi transformasi struktural selama periode pandemi dan paradigma baru tersebut diatas, kemudian menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan daerah dalam menghadapi transformasi struktural dan mengatasi potensi krisis kesehatan ke depan. Sebagai contoh, pandemi telah mengungkap masalah fundamental Bali yang terlalu bergantung pada sektor pariwisata sehingga rentan guncangan. Hal ini dapat menjadi *lesson learned* bagi Bali agar dapat mendiversifikasi struktur ekonomi, di antaranya dengan mengembangkan sektor industri berbasis keunggulan lokal sebagai upaya melengkapi sektor pariwisata.

Indikator umum terjadinya suatu transformasi struktural di suatu daerah di antaranya adalah perubahan sektor basis. Menggunakan data PDRB tingkat Provinsi yang dirilis BPS untuk triwulan II tahun 2019 hingga 2022, diagram-1 menunjukkan telah terjadi transformasi struktural di daerah. Provinsi NTB adalah yang mengindikasikan transformasi positif dengan penambahan -

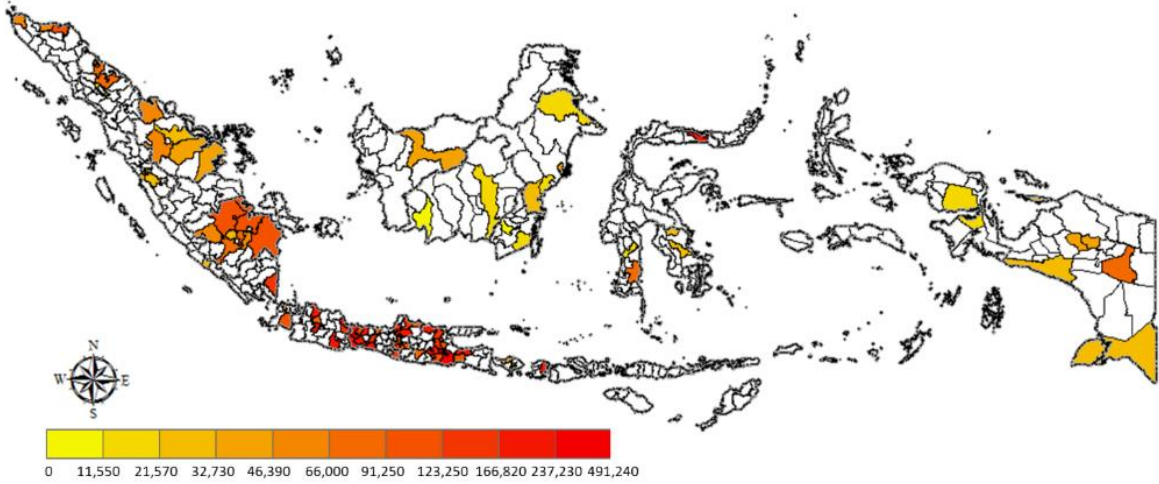
dari 7 menjadi 10 sektor basis, disusul oleh DIY dan Papua dengan pertumbuhan dari 4 menjadi 5 sektor basis. Observasi yang menarik di antaranya bahwa Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah mengalami kemunduran daya saing dengan perubahan sektor basis masing-masing dari semula dari 6 menjadi 4, dan semula 7 menjadi 5. Yang menarik adalah observasi bahwa Provinsi Aceh menambahkan 2 sektor basis di tahun 2020 semasa awal pandemi dari 6 menjadi 8, namun kemudian turun menjadi 6 lagi di tahun 2021. Khusus untuk PDRB Provinsi NTB tahun 2020 menunjukkan sektor pengairan dan listrik gas sebagai sektor basis baru. Tentunya dengan keterkaitan ke depan yang besar maka kedua sektor basis tersebut walaupun kecil perumbuhannya dibanding sektor basis tradisional seperti pertambangan kiranya juga memberi dorongan bagi sektor lain termasuk kesehatan yang amat kritikal di awal pandemi tahun 2020. Adapun untuk mengidentifikasi penyebab menurunnya daya saing Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah di tahun 2020 kiranya memerlukan pendalaman sosial dan ekonomi.

Diagram-1 Jumlah Sektor Basis per Provinsi 2019, 2020, 2021 dan 2022

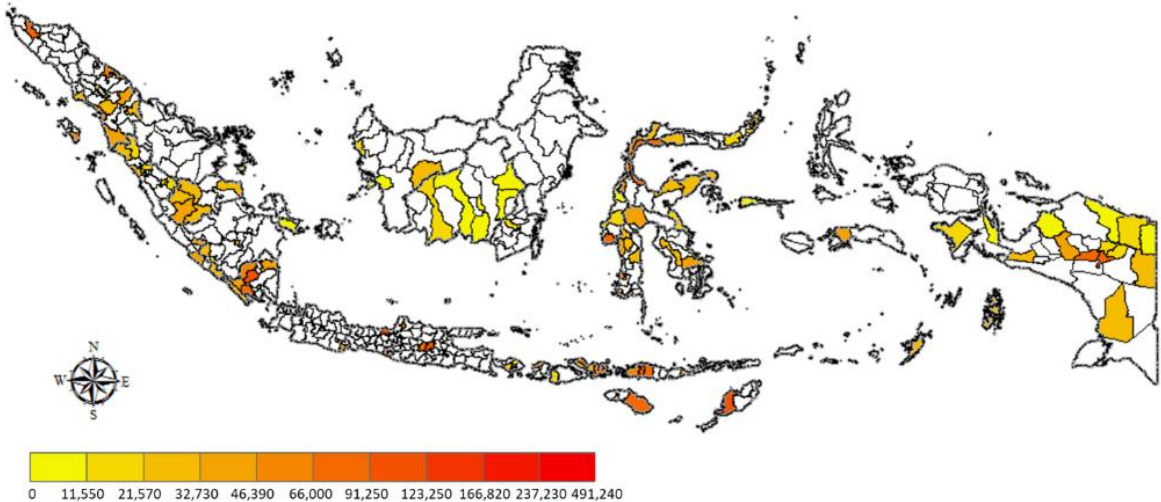


EDITORIAL

Gambar-1 Tingkat Jangkitan Dan Angka Kematian Covid-19 Di Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Daerah 2020 Kategori Tinggi



Gambar-2 Tingkat Jangkitan Dan Angka Kematian Covid-19 Di Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Daerah 2020 Kategori Rendah



Kemudian, untuk melakukan eksplorasi kausalitas bagaimana kaitan kapasitas fiskal daerah dengan ketahanan untuk dapat mengatasi krisis kesehatan ke depan telah dilakukan pemetaan data informasi sebaran Covid-19 terhadap kapasitas daerah, terutama tingkat jangkitan dan angka kematian. Dari observasi gambar-1 dan 2 dapat dilihat bahwa semakin tinggi kapasitas fiskal daerah maka semakin tinggi pula tantangan kesehatan yang dihadapi. Hal ini diduga karena penyebaran wabah Covid-19 erat kaitannya dengan jumlah penduduk suatu wilayah.

Semakin tinggi kapasitas fiskal daerah biasanya dibarengi dengan semakin tingginya populasi sehingga tingkat penyebaran menjadi semakin rentan. Dengan demikian, daerah tidak bisa dibiarkan sendirian dalam menghadapi krisis kesehatan meskipun memiliki kapasitas fiskal tinggi. Penanganan pandemi dan krisis kesehatan memerlukan reformasi kesehatan secara menyeluruh dan sinergi seluruh pihak baik pusat, daerah, badan usaha, maupun masyarakat.



KAJIAN PILIHAN

Collaborative Governance dalam Pembangunan Daerah di Banyuwangi

Pendahuluan

Collaborative governance merupakan paradigma baru dalam manajemen publik untuk pelaksanaan program kegiatan sektor publik. Tata kelola semacam ini berkembang karena selain menjadi kebutuhan pemerintahan juga karena adanya tuntutan perubahan secara internal maupun eksternal. Kompleksitas permasalahan publik tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri tanpa keterlibatan aktor non pemerintah secara aktif. Pendekatan ini semakin diminati untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Di Indonesia, banyak kegiatan – kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan secara kolaboratif. Banyuwangi salah satunya yang menggunakan pendekatan tersebut, baik dalam bidang Pendidikan, pariwisata, kesehatan serta penanggulangan kemiskinan. Terlihatnya adalah melalui inovasi – inovasi yang dilahirkan dalam -

penyelesaian masalah publik yang didalamnya melibatkan aktor non pemerintah daerah secara aktif. Sebut saja- program Siswa Asuh Sebaya yang pengelolaannya dari oleh dan untuk siswa yang bertujuan membantu siswa yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan penunjang untuk sekolah. Penanggulangan kemiskinan yang melibatkan BAZNAS serta masyarakat secara umum atau festival – festival budaya dan olahraga yang diselenggarakan tahunan.

Secara kasat matanya, dalam periode dimana pendekatan kolaboratif itu diimplementasikan di pemerintahan Banyuwangi, dalam periode itu pula kondisi sosial ekonomi dirasakan berubah sangat progresif di Banyuwangi. Kota wisata dan festival menjadi identitas Banyuwangi saat ini. Pariwisata itu pula salah satunya yang menjadi lokomotif pembangunan daerah.

KAJIAN PILIHAN

Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan model *collaborative governance* dalam pembangunan di Banyuwangi. Dengan mengetahui model kolaboratifnya, dengan disertai identifikasi faktor atau unsur apa yang mempengaruhi maka diharapkan hasil kajian bermanfaat untuk menambah referensi praktik baik untuk pendekatan pembangunan daerah serta menambah khazanah dalam *new public management*.

Tinjauan Pustaka

Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2007), Tata kelola kolaboratif adalah keterlibatan pemerintah dan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Donahue dan Zeckhauser juga mendefinisikan pemerintahan kolaboratif adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah sebagai regulator dan swasta sebagai pelaksana. Emerson menjelaskan pemerintahan kolaboratif adalah proses dan pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah dan orang di luar pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa terdapat kriteria dalam membentuk pemerintahan kolaboratif. Kriteria tersebut adalah institusi pemerintah yang menginisiasi forum diskusi, *non-state actor* yang ada dalam peserta forum, peserta yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, terselenggaranya forum secara resmi yang mempertemukan semua pihak yang terkait, menyusun keputusan dengan konsensus, dan fokus kebijakan publik yang bersifat kolaborasi. Pada intinya, tata kelola kolaboratif mutlak melibatkan partisipasi publik secara aktif dalam menyusun kebijakan dan ikut serta dalam forum bersama.

Lebih lanjut, Ansel dan Gash (2008) menjelaskan unsur kolaborasi dari berbagai dimensi mulai dari kondisi yang mengawali, kepemimpinan, kelembagaan dan proses kolaborasinya itu sendiri. Kolaborasi -

terbentuk dari kondisi awal yang meliputi kesenjangan sumberdaya, ketersediaan insentif dan beban masa lalu sehingga kemudian membentuk proses kolaborasi yang membentuk suatu siklus karena adanya dialog tatap, *trust*, komitmen dan sikap saling memahami. Proses kolaborasi ini tak lepas dari peran kepemimpinan yang fasilitatif dan desain kelembagaan yang bersifat terbuka.

Metode Kajian

Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana masalah yang dialami lebih banyak pada eksplorasi pada suatu fenomena yang terjadi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memiliki kedalaman pada konteks yang mengitari fenomena yang terjadi sehingga memiliki kemampuan transferabilitas pada obyek yang lain.

Data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam kepada narasumber atau informan terkait. Instrumen yang digunakan adalah dengan pedoman atau panduan wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur. Adapun penentuan narasumber dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. *Purposive* disini dimaksudkan penentuan narasumber pertama dari Bappeda yang menjadi *leader* dari perencanaan pembangunan daerah. Narasumber selanjutnya akan ditetapkan berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara awal. Selain itu data juga diperoleh dari dokumentasi yang meliputi segala informasi yang mendukung pertanyaan dalam kajian baik itu data – data numerik maupun informasi dari laman – laman resmi yang terkait.

KAJIAN PILIHAN

Analisis dan Pembahasan

Kondisi Awal

Tahun 2011 ke belakang, *image* kota santet masih melekat di Banyuwangi. Daerah yang berlokasi paling timur pulau Jawa dulunya hanya merupakan daerah transit jika orang hendak menyeberang ke pulau Bali. Dikaruniai potensi kekayaan alam dan budaya yang tinggi tidak lantas memberikan keuntungan sosial ekonomi pada masyarakat Banyuwangi.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, problem klasik dihadapi pemerintahan Banyuwangi dimana ego sektoral SKPD sangat tinggi yang menyebabkan birokrasi sangat tidak efisien. Pemerintahan bergerak *business as usual* tanpa gebrakan atau inovasi dalam pelayanan publik. Dengan wilayah yang sangat luas, dalam mendapatkan layanan kependudukan masyarakat membutuhkan waktu mengurus hingga 3 hari. Desa yang menjadi unit pemerintahan formal paling dekat dengan masyarakat tidak berjalan optimal dan terpisah dengan pemerintahan kabupaten dalam tata kelola.

Kolaborasi Internal

Kolaborasi pelaksanaan program pembangunan daerah dimulai dengan kolaborasi internal antar unit – unit di pemerintahan daerah. Beberapa unsur mengikat terjadinya kolaborasi ini. Komitmen bersama, komunikasi intens, soliditas serta diikat dengan media kegiatan – kegiatan kolektif. Salah satu kegiatan tersebut adalah Banyuwangi festival yang dilaksanakan secara keroyokan. Kegiatan – kegiatan dalam Banyuwangi Festival dikerjakan secara mandiri dengan melibatkan hampir oleh seluruh SKPD. Kolaborasi ini dibentuk sebagai budaya kerja melalui proses panjang. Kurang lebih 3 tahun untuk menemukan pola kolaborasi antar SKPD yang sesuai dan menjadi pondasi penting hingga saat ini.



Kolaborasi yang terus dilakukan membuat Banyuwangi adaptif terhadap perubahan ekonomi sosial dan budaya. Pandemi Covid 19 adalah contoh yang sangat relevan dimana seluruh SKPD berjibaku dalam menanggulangi masalah Covid 19. Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, “Kalau dulu semua dinas adalah dinas pariwisata maka saat covid semua dinas adalah satgas Covid 19”. Kolaborasi ini juga membantu adaptasi dari perubahan prioritas pembangunan.

Dalam konteks anggaran, kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk *cross cutting* budgeting dimana dalam penganggaran ini diperlukan dialog kegiatan antar SKPD yang sangat intens. Diluar dokumen perencanaan dan penganggaran secara normatif, Kabupaten Banyuwangi memiliki satu dokumen terkait sinergitas program antar SKPD sebagai pedoman implementasi sinergi antar SKPD . Dengan demikian pelaksanaan suatu program atau *event* dilakukan dengan anggaran keroyokan dari masing – masing SKPD.

KAJIAN PILIHAN

Kolaborasi Eksternal

Sinergi antar SKPD yang solid dengan dilengkapi mindset inovasi dan pelayanan menghasilkan layanan – layanan publik yang menyentuk akar permasalahan. Heintzman dan Marson (2003) dalam risetnya menyebutkan kepercayaan masyarakat dapat dicapai salah satunya melalui pelayanan publik yang memuaskan. Inovasi layanan publik di Banyuwangi memicu timbulnya *public trust* antara masyarakat dengan pemerintah yang merupakan salah satu unsur dari proses kolaborasi.

Selain itu, *public trust* juga ditunjang oleh forum komunikasi rutin tiga pilar yang melibatkan unsur forpimda, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Dalam forum ini, segala permasalahan yang terjadi di Banyuwangi diutarakan. Tentu tidak berhenti dalam wacana, dalam forum ini solusi atas permasalahan dirumuskan secara bersama. Forum tiga pilar tersebut dilaksanakan rutin setiap tiga bulan. Namun demikian banyak forum – forum spesifik lainnya yang diselenggarakan diluar forum tiga pilar misalnya forum dengan HIPMI dan asosiasi – asosiasi lainnya.

Dengan komunikasi yang intens dengan para pemangku kepentingan, sikap mutual understanding terbentuk antara masyarakat dengan pemerintahan daerah Banyuwangi. Pemerintah daerah tentunya menyadari bahwa pembangunan daerah tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat. Terlebih terkait anggaran, pemerintah daerah paham bahwa APBD memiliki keterbatasan dan kekakuan dalam eksekusi kebijakan. Sisi lain, aktor – aktor non pemerintah daerah memahami hal tersebut sehingga bisa mengisi *gap* yang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah daerah. Proses inilah yang mendasari aksi atau implementasi dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan. Hingga hasil atau capaian dari aksi kolaboratif tersebut diutarakan lagi dalam forum komunikasi

Kolaborasi diidentikkan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. OECD (2016) sendiri membagi partisipasi dalam tiga tingkatan dilihat dari *feedback* yang dihasilkan mulai dari Informasi, konsultasi dan partisipasi aktif. Dalam pelaksanaan program pembangunan daerah di Banyuwangi, masyarakat dilibatkan langsung dalam proses dan isi kebijakan dan bahkan tak jarang masyarakat yang justru berinisiatif untuk merumuskan kebijakan untuk selanjutnya dikomunikasikan ke pemerintah daerah.

Peran Kepemimpinan

Dalam membentuk kolaborasi internal ini, peran pemimpin sangat signifikan untuk menyiapkan ekosistemnya. Pemimpin yang memiliki visi dan standar tinggi, peduli akan proses, turun ke bawah diperlukan untuk menciptakan iklim kolaborasi. Dalam tiga tahun awal dimulai dari tahun 2010an, Kepala daerah melakukan investasi SDM yang dilakukan secara sangat masif. Tujuannya untuk merubah *mindset* ASN dalam menjalankan birokrasi agar memiliki semangat sinergi dan inovasi serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Satu hal lain yang menjadi peran pemimpin yaitu membentuk budaya kerja dengan semangat perubahan menjadi lebih baik. Setiap masalah diidentifikasi secara detil agar solusinya menyentuh akar masalah. Barulah dirumuskan inovasi *gap* antara input yang ada dengan target yang akan dicapai. Dalam melahirkan inovasi tersebut, konsep Amati, Tiru dan Modifikasi (ATM) terimplementasi dari hasil studi –banding yang cukup produktif dilakukan.

Pemimpin daerah bertindak sebagai *conductor* dalam *manage* segala potensi sumberdaya di Banyuwangi dengan kemampuan orkestrasi. Pemimpin berperan dalam seluruh rangkaian tata kelola kolaboratif dalam pembangunan daerah baik dalam membentuk kolaborasi internal, menginspirasi lahirnya inovasi – inovasi layanan publik serta aktif berperan dalam proses kolaborasi eksternal.

KAJIAN PILIHAN

Teknologi Informasi sebagai *Enabler*

Dalam rencana pembangunan daerah, teknologi informasi menjadi bagian penting dalam menunjang prioritas pembangunan. Teknologi informasi meliputi penyediaan akses infrastruktur TIK dan penerapan sistem informasi dalam layanan publik. Pembangunan infrastruktur TIK komunikasi masif dilakukan di penjuru wilayah dengan menggandeng provider. Hampir keseluruhan desa – desa di Banyuwangi terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam PODES 2018, dari 217 wilayah desa/kelurahan yang ada di Banyuwangi hanya ada 21 wilayah yang mendapatkan akses internet dengan kekuatan sinyal lemah. Selebihnya akses jaringan internet sangat mumpuni.

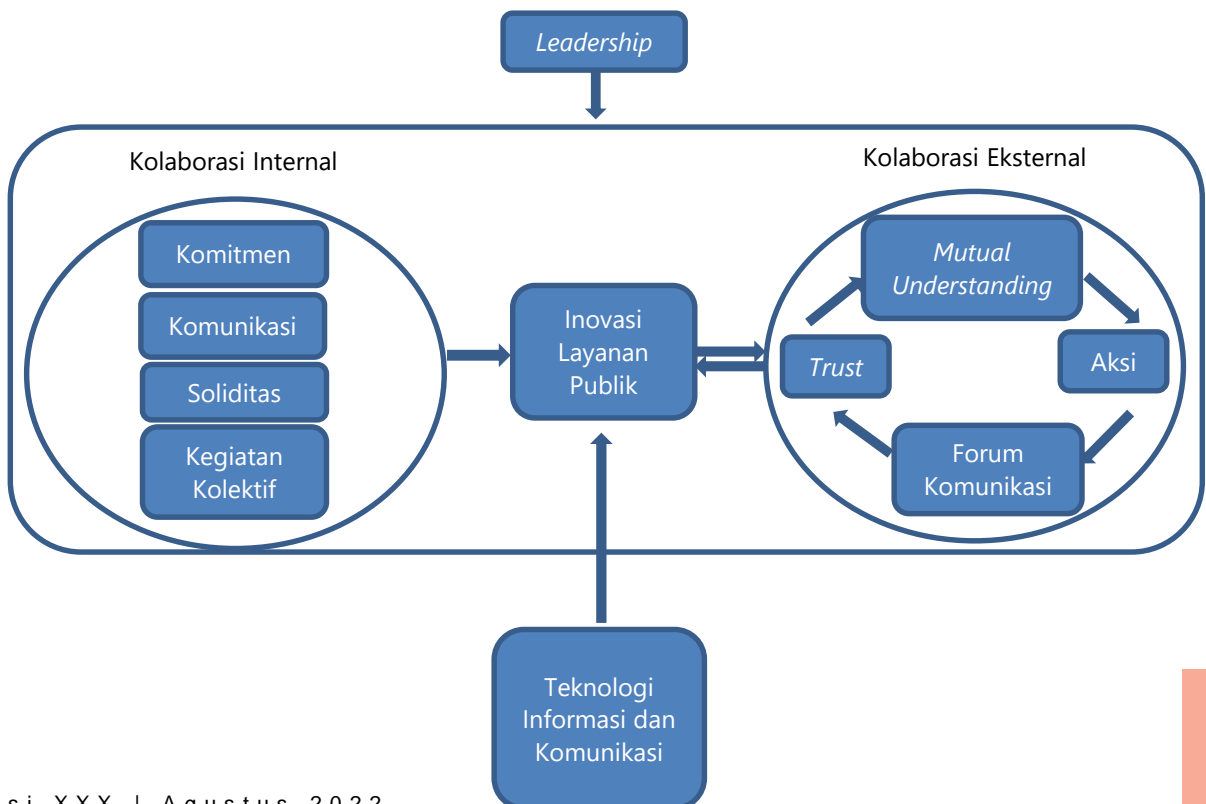
Infrastruktur TIK inilah yang merupakan prasyarat dari pelaksanaan birokrasi berbasis teknologi informasi. Tak jarang inovasi di Banyuwangi memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis layanannya. Salah satunya adalah *Smart Kampung* yang telah diimplementasikan seluruh desa di Banyuwangi. Intinya adalah mendekatkan layanan pemerintah ke masyarakat. Sebisa

mungkin layanan publik dapat dieksekusi dan tuntas di level desa. Di seluruh desa, pelaksanaan pemerintahan telah terintegrasi dengan sistem informasi sehingga mempermudah layanan. Hampir semua layanan kependudukan berhasil ditangani di desa dengan standar waktu tertentu sehingga tidak perlu menyita waktu bekerja dari masyarakat.

Model Tata Kelola Kolaboratif di Banyuwangi

Pemerintah kabupaten Banyuwangi memiliki model tata kelola kolaboratif dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sedikit ekstensif dari model *collaborative* dari Ansel dan Gash, tata kelola kolaboratif Banyuwangi dimulai dari kolaborasi internal antar SKPD di Banyuwangi baik pada level kabupaten hingga level desa. Selanjutnya dari kolaborasi internal ini terekskalasi menjadi kolaborasi eksternal. *Bridgingnya* melalui inovasi layanan publik yang memunculkan *public trust* dan sebaliknya proses kolaborasi eksternal memberikan *feedback* atas lahirnya inovasi layanan publik.

Model Tata Kelola Kolaboratif Pemerintahan Daerah Banyuwangi



KAJIAN PILIHAN

Manfaat dan Dampak Sosial Ekonomi

Kabupaten Banyuwangi yang melakukan perubahan tata kelola pemerintahan dalam satu dekade terakhir berhasil merubah *image* daerah menjadi daerah pariwisata dan sebagai kota festival. Secara statistik, Kabupaten Banyuwangi berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan domestik di tahun 2019 sebesar 710% dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 498%. Dampak lanjutannya adalah peningkatan PDRB dan pendapatan perkapita masyarakat yang cukup signifikan yaitu 159% dari tahun 2010 ke 2019.

Berdasarkan data dari BPS (2021), Kabupaten Banyuwangi berhasil menurunkan kemiskinan selama 10 tahun terakhir, yaitu dari kemiskinan 2 *digit* pada tahun 2010 menjadi 8,06% di tahun 2020. Manfaat kolaborasi cukup terasa pada saat awal pandemi Covid 19, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dan juga dengan BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan. Tahun 2021, tingkat kemiskinan di Banyuwangi hanya naik 0,01% menjadi 8,07%. Capaian ini jauh diatas capaian dari provinsi Jawa timur maupun secara nasional.

Dari sisi pengakuan prestasi, Banyuwangi mendapatkan banyak penghargaan dari Lembaga pemerintah maupun Lembaga internasional. Penerapan model kolaborasi secara langsung maupun tidak langsung membuat kabupaten Banyuwangi mendapatkan banyak penghargaan dari sisi tata kelola pemerintahan. Dalam bidang pariwisata, Banyuwangi meraih UNWTO *Awards for Excellence and Innovation in Tourism* untuk kategori "Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola" mengalahkan nominator lainnya dari Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico. Banyuwangi dikukuhkan sebagai kabupaten terinovatif 3 kali berturut – turut tahun 2018 hingga 2020. Predikat A 6 tahun berturut – turut juga diraih dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan tata kelola perencanaan hingga capaian *outcome*.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Banyuwangi dimulai dari kolaborasi internal antar SKPD. Kolaborasi internal menghasilkan inovasi layanan publik yang memicu proses kolaborasi eksternal karena timbulnya *public trust*. Dalam membentuk ekosistem kolaboratif tersebut, peran kepemimpinan sangat signifikan dalam menginisiasi, menggerakkan serta menginspirasi. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi menunjang kolaborasi tersebut melalui inovasi – inovasi layanan publik yang berbasis TIK.

Dengan demikian, berdasarkan kesimpulan tata kelola kolaboratif dapat digunakan sebagai pendekatan manajemen publik dalam menjalankan pembangunan daerah. Kasus di Banyuwangi merupakan satu contoh yang bisa diterapkan tentunya dengan prasyarat – prasyarat yang sama baik itu kondisi sosial budaya masyarakat, peran pemimpin serta lingkungan yang mempengaruhi.

Daftar Pustaka

- Ansell, Chris and Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press.
- Donahue, John and Richard, Zeckhauser. 2011. *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*. New Jersey: Princeton University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory* 22.1-29.
- Sari, Bella S N. 2019. Evaluasi Implementasi Tata Kelola Kolaboratif Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta. Tesis. Universitas Indonesia.

Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Astera Primanto Bhakti • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy R. Syahrir • Imam Mukhlis Affandi • Britany Alasen Sembiring • Ilham Hadiana • Purwandi Santoso
Isnanto Wimboro Dahrojatun • Catur Panggih Pamungkas • Poppy Suprapti • Irfan Sofi • Sigit Wahyu Kartiko
Ganjar Prihatmoko • Nanag Garendra Timur • Amrul Yusroni • Rossi Rizki Bestari • Dimas Agung Nugraha
Narits Muhammad Syafruddin • Desy Puspita A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa
Selma Syifa Khoirunnisa • Khishbatur Rizqiyah • Netta An'amta Desli Sanati